



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRATIKNO
2. Jabatan : MENTERI SEKRETARIS NEGARA
3. NHK : 180183

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 7.013.425.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m²/112 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.995.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/200 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.467.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 851 m²/250 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.640.125.000
4. Tanah Seluas 552 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 910.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 725.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CROWN SEDAN Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
3. MOBIL, SUZUKI JIMNY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 332.950.499

D. SURAT BERHARGA

Rp. 400.616.851

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 5.285.761.102

F. HARTA LAINNYA

Rp. 281.589.005

Sub Total

Rp. 14.039.342.457

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 14.039.342.457



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.